



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/148/436.1.2/2016**

TENTANG

**RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017
USULAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu menetapkan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 Usulan Pemerintah Kota Surabaya dengan suatu Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 Usulan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017 USULAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

KESATU : Menetapkan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 Usulan Pemerintah Kota Surabaya, dengan uraian dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Oktober 2016

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017 USULAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

A. PRAKARSA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

1. DINAS PERHUBUNGAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	V		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.	V		1. Dinas Perhubungan; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Badan Perencanaan Pembangunan.	

2. DINAS KESEHATAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V	-		V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	
2	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Penambahan Kawasan Tanpa Rokok yang semula 5 (lima) kawasan menjadi 7 (tujuh) kawasan		V	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok		V	1. Dinas Kesehatan 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

3. DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Surat Izin Perumahan	Tata cara Penerbitan Surat Izin Perumahan	V		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	
2	Izin Pemakaian Bangunan	Tata Cara Penerbitan Izin Pemakaian Bangunan	V		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

4. BADAN KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANAMAN MODAL

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	

5. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Surabaya	pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya	V		Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	

6. DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	
2	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	

7. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V		1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	V		1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 2. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal.	
2	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	V		-		V	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

8. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		V	-	V		1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya;	
2.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	V			V		1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.	
3	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	V		1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.	

9. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	V		-	V		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	
2.	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	V		1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;	
3.	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.	

4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman		V	-		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	---	--	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

10. DINAS KEBAKARAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Lingkungan Hidup; 2. Dinas Kebakaran; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

11. DINAS PENDIDIKAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 4. Bagian Bina Program.	

12. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	
2	Perkoperasian	Perkoperasian di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika.	
2	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama	Perubahan ketentuan perizinan menara telekomunikasi bersama		V	Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menmbatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika.	

3	Penyelenggaraan Warung Internet dan Game Online	Penyelenggaraan Warung Internet dan Game Online di Kota Surabaya	V		Kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Satuan Polisi Pamong Praja. 	
---	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

14. BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya	Pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Bagian Perlengkapan.	

15. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	

16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	

17. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surabaya	V	V	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Lingkungan Hidup.	
2	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan		V	Risalah Rapat Terbatas No. R-57/Seskab/DKK/3/2016 Rapat Terbatas tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan terkait Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan		V	Badan Lingkungan Hidup	

3	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan			Risalah Rapat Terbatas No. R-57/Seskab/DKK/3/2016 Rapat Terbatas tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan terkait Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan		V	Badan Lingkungan Hidup	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	------------------------	--

18. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 3. Kecamatan; 4. Kelurahan	

19. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOHAMAD SOEWANDHIE

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	V		Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Rumah Sakit	V		1. Dinas Kesehatan; 2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI